

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

Tahun 2014

**JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,
JAKARTA**

DAFTAR ISI:

I.	STRUKTUR ORGANISASI	1
II.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS & KOMITE-KOMITE PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN	2
III.	PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KANTOR CABANG	6
IV.	PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	18
V.	PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR	25
VI.	RENCANA STRATEGIS BANK	26
VII.	ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK	27
VIII.	PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN PIMPINAN KANTOR CABANG	28
IX.	JUMLAH PENYIMPANGAN (<i>INTERNAL FRAUD</i>)	30
X.	PERMASALAHAN HUKUM	31
XI.	<i>BUY BACK SHARES</i>	32
XII.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	33
XIII.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK	34

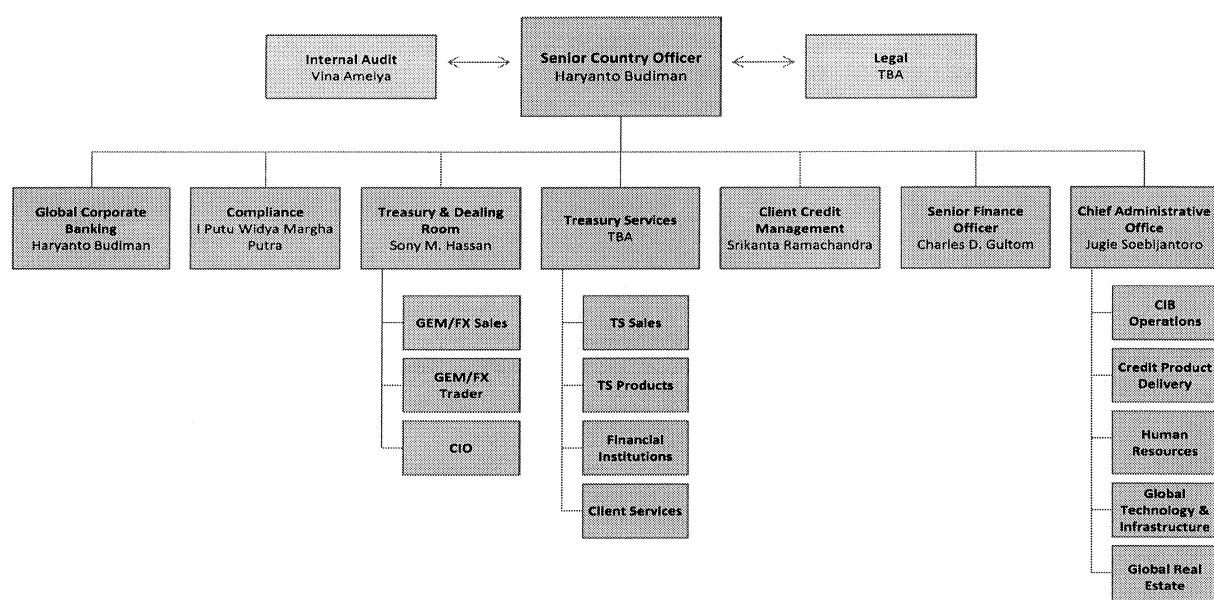
LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION REPORT
POSI SI 31 DESEMBER 2014
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. JAKARTA BRANCH

I. STRUKTUR ORGANISASI

JPMorgan Chase Bank, N.A., cabang Jakarta ("Bank") adalah kantor cabang bank asing yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat dan mempunyai struktur tata kelola perusahaan yang berinduk pada kantor pusat. Bank dipimpin oleh seorang *Senior Country Officer* yang dibantu oleh beberapa pejabat dan kepala-kepala divisi berikut: *Audit*, *Legal*, *Global Corporate Banking*, *Compliance*, *Treasury & Dealing Room*, *Treasury Services*, *Client Credit Management*, *Senior Finance Officer*, *Chief Administrative Officer*, *CIB Operations*, *Credit Product Delivery*, *Human Resources*, *Global Technology & Infrastructure*, dan *Global Real Estate*.

I. ORGANIZATION STRUCTURE

JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta branch ("Bank") is a branch office of a foreign bank head quartered in New York, United States of America and has a corporate governance structure that is based at the Head Office. The Bank is led by a Senior Country Officer, assisted by several officials and heads of the following divisions: Audit, Legal, Global Corporate Banking, Compliance, Treasury & Dealing Room, Treasury Services, Client Credit Management, Senior Finance Officer, Chief Administrative Officer, CIB Operations, Credit Product Delivery, Human Resources, Global Technology & Infrastructure, and Global Real Estate.



II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS & KOMITE-KOMITE PELAKSANA FUNGSI PENGAWASAN

II. THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONER & OVERSIGHT COMMITTEE FUNCTION

Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) jo Pasal 68 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa pelaksana fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite pada kantor cabang bank asing disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku di bank dan wajib memenuhi seluruh fungsi yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang GCG. Selanjutnya disebutkan pula bahwa Bank Indonesia berwenang meminta penyesuaian struktur organisasi kantor cabang bank asing untuk memastikan terlaksananya GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG yaitu dengan diterapkannya struktur pengawasan yang kami uraikan di bawah ini.

Pursuant to Article 67 sub article (2) and (3) in conjunction with Article 68 of Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 concerning the implementation of Good Corporate Governance (GCG) for Commercial Bank, stated that the implementation function of the Board of Commissioners and the formation of committees at the branch office of a foreign bank adapted to the organizational structure prevailing in the bank and shall meet all the functions required in the implementation of GCG as a set in the Bank Indonesia GCG regulation. Furthermore, Bank Indonesia also mentioned the authority to request for organizational structure adjustment of foreign bank branches to ensure effective corporate governance in accordance with Bank Indonesia regulations.

The implementation of the functions of the Board of Commissioners as a whole has met the functions as stipulated in Bank Indonesia Regulation on the Implementation of GCG is the implementation of control structures that we describe below.

a. Oversight Committee

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris di kantor cabang Jakarta dilakukan oleh *Oversight Committee* yang terdiri dari tiga orang pejabat senior yang secara khusus mengawasi kinerja kantor cabang Jakarta. Ketiga anggota *Oversight Committee* tersebut adalah pegawai Kantor Regional. *Oversight Committee* melaksanakan fungsi Dewan Komisaris melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi Bank.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pimpinan Kantor Cabang dan memberikan nasehat kepada Pimpinan Kantor Cabang dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
3. Memastikan bahwa Pimpinan Kantor Cabang telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
4. Melalui satuan kerja Kepatuhan, memberitahukan kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secepatnya sejak ditemukannya:

a. Oversight Committee

The implementation of the functions of the Board of Commissioners in Jakarta branch conducted by the Oversight Committee consisting of three senior officers who specifically oversees the performance of the Jakarta branch office. The three members of the Oversight Committee is an employee of the regional office. Oversight Committee for carrying out the functions of the Board of Commissioners through the following matters:

1. *To ensure the implementation of GCG in every business activities of the Bank at all levels of the organization of the Bank.*
2. *To implement monitoring of the implementation of the tasks and responsibilities of the Branch Leadership and gives advice to the Leadership of the Branch to instruct, monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Bank.*
3. *To ensure that Branch Leadership have to follow up audit findings and recommendations from SKAI, external auditors, the results of supervision of Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and / or the results of other surveillance authority.*
4. *Through Compliance division, to inform Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan as soon as the followings have been identified:*

- a. pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.
5. Melalui satuan kerja Kepatuhan, memberitahukan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secepatnya sejak diputuskannya adanya indikasi transaksi mencurigakan.

Oversight Committee mengadakan rapat minimum setiap kwartal. Selama tahun 2014 rapat *Oversight Committee* diadakan sebanyak 4 kali dimana semua telah memenuhi persyaratan *quorum*.

b. Audit Committee

Komite Audit JPMorgan Chase & Co Holding Company bertanggung-jawab untuk membantu Dewan Direksi JPMorgan Chase & Co Holding Company untuk melakukan pengawasan terhadap:

- Kualifikasi dan independensi dari kantor akuntan publik yang teregisterasi dan independen;
- Performa dari fungsi internal audit perusahaan dan kantor akuntan publik teregistrasi dan independen;
- Tanggung-jawab Manajemen untuk memastikan adanya sistem kontrol yang efektif secara desain untuk:
 - Menjaga aset dan pendapatan

a. violations of laws and regulations in the field of finance and banking; and

b. conditions or arrangements that can endanger the going concern of the Bank.

5. *Through Compliance division, to inform the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) as soon as possible since indications of suspicious transactions have been determined.*

Oversight Committee performs meetings at minimum every quarter. During the year 2014, the oversight committee meetings have been held 4 times in which they all have met minimum quorum requirements.

b. Audit Committee

The JPMorgan Chase & Co Holding Company Audit Committee is responsible to assist the JPMorgan Chase & Co Holding Company Board of Directors oversight of:

- *The independent registered public accounting firm's qualifications and independence;*
- *The performance of the corporation's internal audit function and independent registered public accounting firm;*
- *Management's responsibilities to assure that there is in place an effective system of controls reasonably designed to:*
 - *Safeguard the assets and income of*

perusahaan,

- Memastikan integritas laporan keuangan perusahaan, dan
- Menjaga kepatuhan dengan standar etika perusahaan, kebijakan, rencana dan prosedur, serta terhadap undang-undang dan peraturan yang ada.

the corporation,

- Assure the integrity of the corporation's financial statements, and
- Maintain compliance with corporation's ethical standards, policies, plans and procedures, and with laws and regulations.

c. Risk Policy Committee

Sesuai struktur organisasi Bank, pelaksanaan fungsi Komite Pemantauan Risiko dilaksanakan oleh *Risk Policy Committee* yang berada di Kantor Pusat Bank dengan tujuan melakukan fungsi pengawasan atas tanggung-jawab *Chief Executive Committee* dan manajemen senior perusahaan, mengukur manajemen risiko kredit, pasar, suku-bunga, investasi, likuiditas, dan reputasi perusahaan dan juga mengkaji-ulang aktivitas fiducia dan manajemen aset.

c. Risk Policy Committee

As per organizational structure of the Bank, the implementation of the Risk Oversight Committee functions performed by the Risk Policy Committee in the Bank's Head Office in order to perform oversight functions on the responsibility of the Chief Executive Committee and senior management of the company, to measure credit, market, interest, investment , liquidity, and reputation risks of the company and also reviewing fiducia and asset management activities.

d. Compensation & Management Development Committee, Corporate Governance & Nominating Committee

Sesuai struktur organisasi Bank, pelaksanaan fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dilaksanakan oleh *Compensation & Management Development Committee* *Corporate Governance and Nominating Committee*. Kedua komite ini berada di Kantor Pusat Bank, tanggung jawab mereka adalah:

d. Compensation & Management Development Committee, Corporate Governance & Nominating Committee

As per organizational structure of the Bank, the implementation of the Remuneration and Nomination Committee functions are carried out by the Compensation & Management Development Committee and the Corporate Governance and Nominating Committee. Both these committees are in the Bank's Head Office, their key responsibilities are:

Compensation & Management Development Committee	Compensation & Management Development Committee
--	--

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Mengkaji dan memberi persetujuan atas program kompensasi dan manfaat Perusahaan;• Memastikan daya saing program kompensasi Perusahaan;• Melakukan pengawasan atas prinsip dan praktik kompensasi dan meninjau hubungan antara risiko, manajemen risiko dan kompensasi terhadap tujuan Perusahaan; dan• Memberi saran kepada Board mengenai perkembangan dan rencana suksesi/penggantian pejabat eksekutif. | <ul style="list-style-type: none">• Reviews and approves the Firm's compensation and benefit programs;• Ensures the competitiveness of the Firm's compensation programs;• Provides oversight of the Firm's compensation principles and practices and review of the relationship among risk, risk management and compensation in light of the Firm's objectives; and• Advises the Board on the development and succession planning for key executives. |
|---|--|

Corporate Governance & Nominating Committee	Corporate Governance & Nominating Committee
--	--

Melakukan pengawasan umum terhadap tata kelola Board, termasuk:

- Mengkaji dan memberi rekomendasi terhadap kandidat diajukan untuk pemilihan oleh Board;
- Mengevaluasi Prinsip Corporate Governance Board dan memberi saran untuk perubahan-perubahan; dan
- Menyetujui kerangka untuk penilaian Board dan penilaian sendiri.

Corporate Governance & Nominating Committee	Corporate Governance & Nominating Committee
--	--

Exercises general oversight for the governance of the Board, including by:

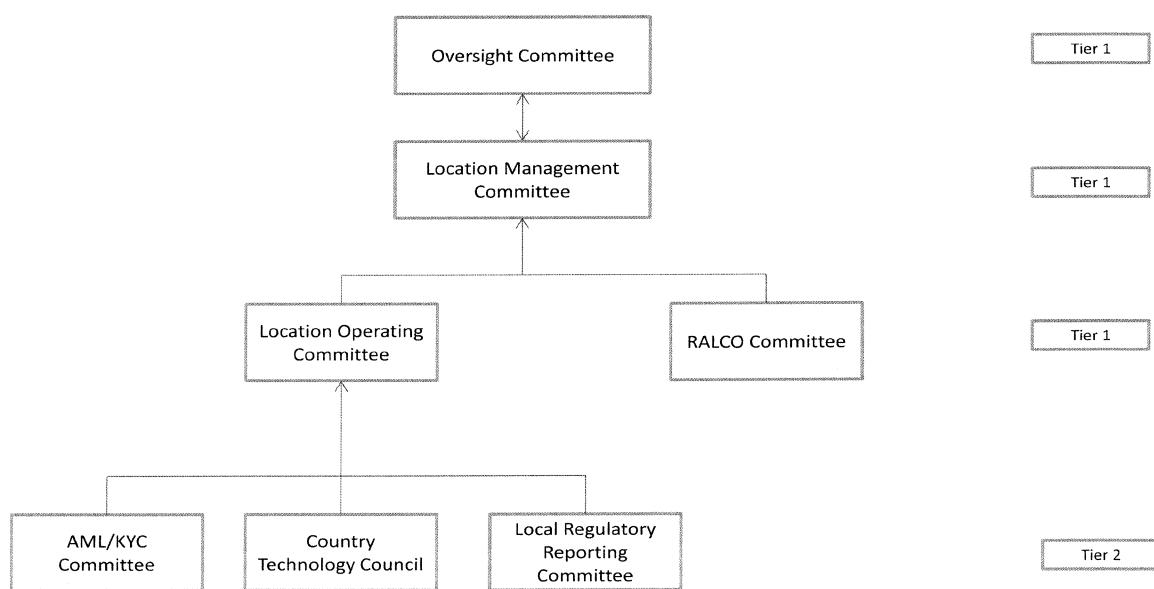
- Reviewing and recommending proposed nominations for election to the Board;
- Evaluating the Board's Corporate Governance Principles and recommending any changes; and
- Approving the framework for Board assessment and self-evaluation.

III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KANTOR CABANG

III. THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BRANCH LEADERSHIP

Berdasarkan pasal 1 butir 3.d Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan Dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri, Dewan Direksi bagi kantor cabang bank asing adalah Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing yang terdiri dari Pemimpin Kantor Cabang dan pejabat satu tingkat di bawah Pemimpin Kantor Cabang. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Kantor Cabang dibantu oleh sejumlah komite yang sekaligus menjadi bagian dari tata-kelola Bank (*local governance*) seperti dapat dilihat dalam struktur dibawah ini.

*Under article 1, point 3.d Bank Indonesia Regulation. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and the Decree of the Board of Directors of Bank Indonesia. 32/37/KEP/DIR dated May 12, 1999 on the Requirements and Procedures for Opening of Branch Offices and Representative Offices of the Bank Domiciled in Abroad, the Board of Directors for a branch office of a foreign bank is Branch Leadership comprising Head of the Branch Office and officials one level below the Head of the Branch Office. To carry out the duties and responsibilities the Head of the Branch Office is assisted by a number of committees which also became part of the Bank's governance (*local governance*) as we can see in the following structure.*



Anggota Pimpinan Kantor Cabang di angkat oleh kantor pusat berdasarkan Surat Penunjukan. Susunan Pimpinan Kantor Cabang pada akhir Desember 2014 terdiri dari:

Members of the Branch Leadership are appointed by the Head Office by virtue of designation. The composition of the Branch Leadership as end of December 2014 is as follow:

1.	Pemimpin Kantor Cabang / <i>Head of Branch Office</i>	Haryanto T. Budiman
2.	Direktur Kepatuhan / <i>Compliance Director</i>	I Putu Widya Margha Putra
3.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang / <i>Member of Branch Office Leadership</i>	Sony M. Hassan
4.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang / <i>Member of Branch Office Leadership</i>	Srikanta B. Ramachandra
5.	Anggota Pimpinan Kantor Cabang / <i>Member of Branch Office Leadership</i>	Jugie Soebijantoro

Kelima Pimpinan Kantor Cabang berdomisili di Indonesia serta berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Saudara I Putu Widya Margha Putra telah diangkat sebagai salah satu anggota Anggota Pimpinan Kantor Cabang sekaligus menjabat sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

The five members of the Branch Leadership domiciled in Indonesia and are independent from the controlling shareholders. The Bank has appointed I Putu Widya Margha Putra as a member of the Location Management team as well as the Compliance Director tasked to determine the steps needed in order to ensure compliance with regulations issued by Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, and prevailing rules, laws and regulations as well as agreements and commitments to Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 13/2/PBI/2011 date of January 12, 2011 on the Implementation of the Compliance Function in Bank. The Bank appointed Jugie Soebijantoro as a member of the Location Management Team with the title as Chief

Umum. Bank juga telah menunjuk saudara Jugie Soebijantoro sebagai Anggota Pimpinan Kantor Cabang dengan jabatan sebagai *Chief Administrative Officer*. Saudara I Putu Widya

Margha Putra dan saudara Jugie Soebijantoro telah lulus Fit & Proper dari Otoritas Jasa Keuangan.

Terdapat pengunduran diri anggota pimpinan kantor cabang, yaitu Saudara M. Michael Sugirin yang mengundurkan diri dari Bank di bulan Agustus 2014.

a. *Location Management Committee*

Anggota *Location Management Committee* terdiri dari anggota Pimpinan dan seluruh kepala Divisi yang dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi strategi bisnis yang dijalankan oleh masing-masing Divisi;
2. Mengevaluasi sistem kontrol yang dijalankan oleh Bank dan memastikan serta memantau pelaksanaanya;
3. Mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara umum yang dihasilkan oleh masing-masing Divisi;
4. Mengevaluasi risiko-risiko yang kemungkinan akan timbul terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masing-masing Divisi;
5. Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pemenuhan atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
6. Memastikan adanya pengawasan

Administrative Officer. I Putu Widya Margha Putra and Jugoe Soebijantoro have passed the Fit & Proper test from Otoritas Jasa Keuangan.

There was one Branch Leadership member resignation, M. Michael Sugirin who resigned from the Bank in August 2014.

a. *Location Management Committee*

Membership of the Location Management Committee consisting of members from the Location Management Leadership and the entire head of the division that was formed in order to carry out the following functions:

1. *Evaluating business strategies implemented by each Division;;*
2. *Evaluating control system operated by the Bank as well as ensure and monitor implementation;*
3. *Evaluating the Bank's financial performance is generally generated by each Division;*
4. *Evaluating the risks that may be incurred related to business activities conducted by each Division;*
5. *Establishing policies and procedures to ensure compliance with the provisions of applicable laws;*
6. *Ensuring supervision of any employee*

- | | |
|--|---|
| <p>terhadap setiap pegawai yang berwenang di Bank;</p> <p>7. Memastikan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang berlaku baik internal maupun eksternal;</p> <p>8. Mengevaluasi dan memantau pengelolaan gedung dan strategi jangka panjang; dan</p> <p>9. Mengevaluasi kebijakan <i>Human Resources</i> (sumber daya manusia), program gaji dan rencana pelaksanaannya.</p> | <p><i>authorized in the Bank;</i></p> <p>7. Ensuring compliance with applicable policies and procedures both internally and externally;</p> <p>8. Evaluating and monitoring building management and long-term strategy; and</p> <p>9. Evaluating Human Resources policies, salary and program implementation plans.</p> |
|--|---|

Location Management Committee mengadakan rapat sebulan sekali.

The Location Management Committee meetings conducted on a monthly basis.

b. *Location Operating Committee (LOC)*

Anggota LOC terdiri dari kepala-kepala divisi yang terkait dengan kegiatan operasional Bank yang terdiri dari divisi *CIB Operations, Technology and Infrastructure, Compliance, Finance, Human Resources, Admin Facilities, serta Audit*. LOC dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan sistem kontrol operasional dan mengkonsultasikannya dengan tim regional untuk memastikan terpeliharannya sistem kontrol yang baik dalam kegiatan bisnis terkait.
2. Menampung dan memonitor penyelesaian masalah yang terkait dengan hasil audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tim pengawas Otoritas Jasa Keuangan,

b. *Location Operating Committee (LOC)*

LOC members consist of the heads of divisions related to operational activities of the Bank consisting of CIB Operations, Technology and Infrastructure, Compliance, Finance, Human Resources, Admin Facilities and Audit. LOC was formed in order to carry out the following functions:

1. Evaluating issues related to the operational control system and consult with the regional team to ensure the maintenance of good control system in business-related activities.
2. Accommodating and monitor for problems associated with the results of the audit conducted by Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan supervisory

<p>Auditor (internal dan eksternal), Hukum dan Kepatuhan.</p> <p>3. Memastikan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur untuk setiap divisi di kantor cabang Jakarta.</p> <p>4. Mendiskusikan dan mengkomunikasikan semua ide atau inisiatif untuk pengembangan sistem operasional yang terbaik untuk diterapkan di Bank.</p> <p>LOC mengadakan rapat sebulan sekali dan membawahi beberapa komite seperti AML/KYC Committee, Local Regulatory Reporting Committee dan Country Technology Council.</p>	<p><i>Team, auditors (internal and external), Legal and Compliance.</i></p> <p>3. <i>Ensuring the infrastructure requirements for each division at the Jakarta branch office.</i></p> <p>4. <i>To discuss and communicate all ideas or initiatives for the development of best operational system to be applied in the Bank.</i></p> <p><i>LOC meetings conducted monthly basis and supervising the function of the AML/KYC Committee, Local Regulatory Reporting Committee and the Country Technology Council.</i></p>
--	---

c. Risk & Asset & Liability Committee (RALCO)

Anggota RALCO terdiri dari *Chief Administrative Officer, Chief Finance Officer, LOB and CTC Heads, Chief Compliance Officer, Oversight & Control Manager, Head of Internal Audit, Head of Human Resources, Head of Legal, Head of CIB Operations and Regulatory Risk Management and Reporting.* RALCO dibentuk untuk memberikan pengawasan atas risiko-risiko inheren dari bisnis di Indonesia, termasuk tapi tidak terbatas pada:

Risiko: Pengawasan risiko likuiditas, kerangka kerja risiko operasional, hukum, kepatuhan, pasar, kredit, Negara, reputasi dan stratejik.

ALCO: pendanaan, permodalan, pengelolaan likuiditas, pencatatan keuangan dan risiko suku bunga pada *banking book*.

c. Risk & Asset & Liability Committee (RALCO)

RALCO members consist of the heads of Chief Administrative Officer, Chief Finance Officer, LOB and CTC Heads, Chief Compliance Officer, Oversight & Control Manager, Head of Internal Audit, Head of Human Resources, Head of Legal, Head of CIB Operations and Regulatory Risk Management and Reporting. RALCO was formed to provide oversight of the risks inherent in the firm's business in Indonesia, including but not limited to:

Risk: liquidity risk oversight, operational risk framework, legal, compliance, market, credit, country, reputational and strategy risk.

ALCO: funding, capital, liquidity management, financial statements and interest rate risk in banking book.

RALCO mengadakan rapat minimum sebulan sekali. RALCO meetings conducted monthly basis.

d. Local Regulatory Report Committee (LRR)

Anggota LRR terdiri dari satuan kerja *Compliance, Finance, CIB Operations, Human Resources* dan *Client Credit Management*. LRR dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Mengevaluasi semua kebijakan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya di bidang perbankan serta mendiskusikan dampak yang akan timbul yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Bank.
2. Memastikan tindak lanjut temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, Bank Indonesia, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Melalui satuan kerja Kepatuhan, memberitahukan kepada Bank Indonesia secepatnya sejak ditemukannya: pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan Bank.

LRR mengadakan rapat minimum satu kali dalam dua bulan.

a. Local Regulatory Report Committee (LRR)

LRR members consist of Compliance, Finance, CIB Operations, Human Resources and Client Credit Management. LRR was formed in order to carry out the following functions:

1. *Evaluating all policies and applicable legal, especially in banking and discussed the effects that would arise which could affect the Bank's business activities.*
2. *Ensuring follow-up on audit findings and recommendations from Internal Audit, the external auditors, Bank Indonesia, results of the supervision of Otoritas Jasa Keuangan and / or the results of other authorities.*
3. *Through Compliance unit, informed Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan as soon as possible since the identification of: violations of the laws and regulations in finance and banking and a condition or condition that may be assumed to jeopardize the Bank.*

LRR meetings conducted once every two months.

e. Information Technology Operating Committee (ITOC)

Anggota ITOC terdiri dari satuan kerja Kepatuhan, Finance, CIB Operation and Technology, Audit, ITRM dan GTI. ITOC dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai Rencana Stategis Teknologi Informasi (IT Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank;
2. Mengkaji kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
3. Mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
4. Mengkaji kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan system informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha bank;
5. Mengkaji efektifitas langkah-langkah meminimalkan resiko atas investasi bank pada sector Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank;
6. Memantau kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
7. Memantau upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja

e. Information Technology Operating Committee (ITOC)

ITOC members consist of Compliance, Finance, CIB Operation and Technology, Audit, ITRM and GTI. ITOC was formed in order to carry out the following functions:

1. Provide recommendation to Board of Directors of the IT Strategic Plan which inline with Bank's Business Strategic Plan;
2. Review the alignment of IT projects approved in the IT Strategic Plan;
3. Review the alignment of IT projects with project charter plan;
4. Review the alignment of IT with management information system and bank's business requirement;
5. Review the effectiveness of risk management on the IT investment's bank in order to contribute the investment with the achievement of bank's business goal;
6. To monitor IT performance and improvement plan;
7. To monitor problem resolution related with IT which unable to be solved by line of business user and provider in effective,

pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.

ITOC mengadakan rapat minimal satu kali sebulan. *ITOC meetings conducted in monthly basis.*

f. AML/KYC Committee

Keanggotaan Komite adalah *Compliance/MLRO – sebagai chairman, Line of Business Heads/Sales, GCB Banker, Chief Administrative Officer, TS Customer Services, TS Product; dan CIB Operations.*

Misi dari Komite ini adalah memperkuat dan mempromosikan tata kelola program AML/KYC Bank yang diharuskan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan otoritas lokal lainnya, seperti: PPATK, dsb; serta selalu terbarukan dengan perkembangan program AML/KYC JP Morgan Chase & Co (“JPMC”).

Tujuan dari Komite ini adalah sebagai berikut:

1. Memonitor perkembangan pengkinian profil dan transaksi nasabah, dan bilamana relevan, untuk mengeskalasikan suatu *exception* ke tim regional;
2. Memastikan *risk rating* Nasabah telah sesuai dengan ketentuan BI;
3. Memastikan kecukupan identifikasi dan monitoring Nasabah-nasabah yang *high risk*;
4. Memastikan kebijakan lokal yang relevan dikenakan sesuai dengan perkembangan ketentuan lokal dan kebijakan regional/global terkait dengan AML/KYC;

efficient and timely manner.

f. AML/KYC Committee

Membership of the Committee include Compliance/MLRO – as chairman, Line of Business Heads/Sales, GCB Banker, Chief Administrative Officer, TS Customer Services, TS Product; and CIB Operations.

The mission of the Committee is to strengthen and to promote the governance of the AML/KYC program of the Bank as required under the prevailing Bank Indonesia regulation as well as other relevant local regulatory requirements, such as: PPATK, etc; and to keep abreast of any development in JP Morgan Chase & Co (“JPMC”) AML/KYC program.

The objectives of the Committee are:

1. *To monitor the timely update of client profiles and transaction profiles, and where relevant, to escalate to relevant regional team of any exception;*
2. *To ensure that client risk rating is align with relevant BI regulation;*
3. *To ensure proper identification and monitoring of high risk clients;*
4. *To ensure that relevant local policy is updated with the most recent development in local regulations and regional/global policies in regards to*

- AML/KYC;*
- | | |
|---|---|
| <p>5. Mempromosikan pemahaman terhadap perkembangan dari ketentuan lokal dan program-program di tingkat regional/global yang trekait dengan program AML/KYC;</p> <p>6. Mempromosikan pemahaman untuk mengidentifikasi <i>unusual pattern</i> atas transaksi Nasabah yang dapat menimbulkan potensi transaksi mencurigakan; dan</p> <p>7. Memastikan pengkinian <i>Sanction list</i> lokal dan <i>KPK black list</i>; dan memastikan telah dimasukkan kedalam list internal bank untuk <i>screening</i> dan <i>monitoring</i>.</p> | <p>5. To promote awareness of any development in the relevant local regulatory requirements and regional/global projects relevant to AML/KYC program;</p> <p>6. To promote awareness in identifying unusual pattern in client's transaction that could lead to potential suspicious transaction; and</p> <p>7. To keep abreast of any update/development in the establishment of the local Sanction list and in the KPK black list; and ensure that it is incorporated into the bank internal list for proper screening and monitoring.</p> |
|---|---|

AML/KYC mengadakan rapat minimal satu kali sebulan. *AML/KYC meetings conducted monthly basis.*

g. Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja *Compliance* (kepatuhan) yang independen terhadap satuan kerja operasional. *Compliance* bertanggung-jawab langsung kepada Pemimpin Kantor Cabang.

Tugas dan tanggung jawab *Compliance* antara lain:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan

g. Compliance Function

In order to facilitate the implementation of the functions of the Director of Compliance, the Bank has established a Compliance working unit (Compliance) is independent of the operational working units. Compliance is responsible directly to the Head of the Branch Office.

The duties and responsibilities of Compliance among others:

1. Setting the necessary steps to ensure that the Bank has met all the regulations of Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan and other laws and

- peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- regulations that apply within the framework of the implementation of the prudential principle.*
- 2. To monitor and keep the Bank's business activities do not deviate from the applicable rules and regulations.*
 - 3. To monitor and maintain compliance with the Bank's entire agreement and commitments made by the Bank to Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan.*

h. Fungsi Audit Intern

Internal Audit adalah fungsi yang independen yang memberikan jaminan tujuan dipandu oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal.

Ruang lingkup Audit Internal meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektivitas desain tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal serta kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dinyatakan organisasi.

Audit JPMC menggunakan pendekatan audit berbasis risiko yang dirancang untuk memastikan campuran yang tepat dari

h. Internal Audit Function

Internal Audit is an independent function that provides objective assurance guided by a philosophy of adding value to improve the operations of the organization. It assists the organization in accomplishing its objectives by bringing a systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the organization's governance, risk management, and internal control processes.

The scope of Internal Auditing encompasses, but is not limited to, the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the design of the organization's governance, risk management, and internal control processes as well as the quality of performance in carrying out assigned responsibilities to achieve the organization's stated goals and objectives.

JPMC Audit uses a risk based audit approach designed to ensure an appropriate mix of audit coverage focused on key risks and controls of

cakupan pemeriksaan difokuskan pada risiko-risiko utama dan kontrol dari setiap bisnis dan untuk berpendapat pada sistem pengendalian internal JPMC.

i. External Audit Function

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Audit Ekstern, Bank telah menujuk Kantor Akuntan Publik *Price Waterhouse Coopers* dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank. Penunjukan Kantor Akuntan Publik ditentukan oleh kantor regional dan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Keuangan Bank.

In the implementation of External Audit function, the Bank has appointed Price Waterhouse Coopers public accounting firm to audit the financial statements of the Bank. Public Accountant designation is determined by the regional office and be guided by the provisions contained in the Bank Indonesia Regulation on Bank Financial Transparency.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

a. Faktor-faktor Risiko

Dalam kegiatannya bank memiliki eksposur terhadap beberapa risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas disamping risiko lainnya seperti risiko reputasi, hukum, kepatuhan dan strategik. Penerapan manajemen risiko bank telah dilakukan secara memadai dengan menggunakan prinsip kehati-hatian serta mengikuti kebijakan internal dan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam implementasinya, setiap lini organisasi bank kami telah memahami tentang perlunya kesadaran atas adanya risiko inheren yang harus dikelola secara seksama dan menyeluruh. Bank kami telah memiliki metodologi pengukuran dan pemantauan manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan model bisnis bank yang merupakan kantor cabang bank asing.

b. Pelaksanaan Manajemen Risiko Risiko Kredit

Manajemen atas risiko kredit dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pemberian kredit telah melalui proses analisa dan seleksi yang menggunakan prinsip kehati-hatian seperti telah tercermin dalam kebijakan internal kami dalam bidang perkreditan. Proses persetujuan kredit sesuai batas wewenang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari unit independen yang

IV. RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

a. Risk Factors

In its activities the bank has exposure to several risks which consists of credit, market, operational, liquidity risks in addition to other risks such as reputational, legal, compliance and strategic risks. The application of the bank's risk management has been done adequately by using the prudential principle and follow internal policies and regulations of Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. In the implementation, each line of the bank organization have understood about the need for awareness of the inherent risks that must be managed carefully and thoroughly. Our bank has applied risk measurement and monitoring methodology in accordance with the Bank's business model which is a branch office of a foreign bank.

b. Risk Management Implementation Credit Risk

The management of credit risk is performed by ensuring that every loan has been through the selection process and the analysis using the prudential principles as has been reflected in our internal policies in the field of credit. Credit approval process within the limits of the authority made on the recommendation of an independent unit responsible for credit risk management, as well as supervision and

bertanggung jawab atas manajemen risiko kredit, serta pengawasan dan monitoring atas penggunaan kredit senantiasa dilaksanakan dari waktu ke waktu dengan mengamati perkembangan kondisi debitur. Bank telah menerapkan metode *Internal Rating* yang terdiri dari *Obligor Grade* dan *Facility Grade* untuk memantau kolektibilitas debitur baik secara individu, grup dan portofolio sehingga besarnya eksposur risiko kredit dapat diketahui setiap saat sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan pencegahan dini yang diperlukan. Secara umum sebagaimana tahun 2013 dalam tahun 2014 tingkat kolektibilitas dan *Internal Rating* debitur baik dan stabil dimana tidak terdapat *credit downgrade* atau penurunan tingkat kolektibilitas kredit yang signifikan dari debitur-debitur besar bank kami. Disamping itu dalam rangka mitigasi atas risiko konsentrasi kredit, bank juga telah melakukan diversifikasi atas portofolio kreditnya berdasarkan sektor industri yang meliputi perusahaan pembiayaan, pertambangan, perdagangan, properti, media komunikasi, manufaktur dan industri lainnya seperti pengolahan, pergudangan, elektronika, tekstil dan lain lain. Aktivitas *Global Corporate Banking* yang kami mulai di tahun 2012 di tahun 2014 tetap berfokus pada perusahaan-perusahaan multinasional dan terkemuka di Indonesia yang akan memberikan efek positif dalam diversifikasi eksposur yang secara otomatis akan menurunkan risiko konsentrasi kredit. Sejalan dengan arahan strategi Bank

monitoring of the use of credit is always carried out from time to time to observe the development of the condition of the debtors. Bank has implemented Internal Rating methodology comprising Obligor Grade and Facility Grade to monitor the collectability of debtors individually, in groups and portfolios so that the amount of credit risk exposure can be determined at any time to allow for early preventive measures are needed. In general, as it was in 2013 in the year 2014 level of debtors collectibility and Internal Rating is good and stable where there is no credit downgrade or reduction of significant loan collectability of debtors of our banks. In addition, in order to mitigate the concentration of credit risk, the bank also has to diversify its loan portfolio by industry sector, which includes finance, mining, trade, property, media, communications, manufacturing and other industries such as processing, storage, electronics, textiles and others. Global Corporate Banking activities that was started in 2012 in 2014 will still focus on multinational and leading Indonesian companies which will have a positive effect on the diversification of exposures that will automatically lower the concentration of credit risk. Inline with our strategic direction for the Bank's focus on corporate debtors from multinational and top companies blue chip companies), we can argue that credit risk tend to be low because the debtors generally have good credit ratings, and have been recognized by intertaional

kami untuk berfokus pada debitur-debitur korporasi dari perusahaan multinasional dan perusahaan papan atas (*blue chip companies*), kami berpendapat bahwa risiko kredit cenderung rendah karena debitur-debitur tersebut secara umum memiliki *credit rating* yang baik dan sudah diakui oleh lembaga pemeringkat internasional. Selama tahun 2014 angka *non-performing loan* (NPL) kami tergolong rendah dan selalu nihil yang tercemin dari tingkat kolektibilitas yang baik sehingga membuktikan bahwa eksposur risiko kredit bank kami tergolong rendah.

Risiko Pasar

Dalam pengelolaan risiko pasar atas eksposur aktivitas perdagangan surat berharga dan nilai tukar, bank kami telah menggunakan metode *Value-at-Risk* (VaR) yang memperhitungkan batas kerugian maksimum yang dapat diterima oleh bank dengan tingkat kepercayaan atau *confidence level* 99%. Bank telah menentukan batasan limit berdasarkan besaran nilai *Value-at-Risk* (VaR), *Basis Value Point* (BPV) dan *Net Open Position* (NOP) yang dihitung dan dipantau secara harian oleh unit yang independen dari *treasury dealing room*. Disamping itu bank juga telah menetapkan *Stop Advisory Limit* dalam rangka pemantauan atas kerugian yang dapat ditimbulkan dari aktivitas perdagangan surat berharga dan valuta asing. Untuk meyakinkan tingkat kepercayaan hasil perhitungan VaR, telah dilakukan proses *Back Testing* secara berkala

rating institutions. During the year 2014 the Bank's non-performing loan (NPL) rate is considered low and is always zero which reflected a good level of collectibility thus proving that our bank's exposure to credit risk is low.

Market Risk

In the management of market risk exposure of securities trading activities and exchange rate, our bank has applied Value-at-Risk (VaR) methodology which takes into account the maximum loss limit that is acceptable to the bank with the level of trust or confidence level of 99 %. Bank has set limits based on the values of Value-at-Risk (VaR), Basis Point Value (BPV) and Net Open Position (NOP) which is calculated and monitored daily by an independent unit of the treasury dealing room. In addition, the Bank has also established Advisory Stop Limit in order to monitor for any loss that may result from securities trading and foreign Exchange activities. To ensure the level of confidence in the results of the VaR calculation, Back Testing process has been carried out on a regular basis to be reported every month. Similarly, Stress Testing to test

untuk dilaporkan setiap bulan. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan *Stress Testing* untuk menguji ketahanan bank apabila menghadapi beberapa skenario ekstrim dari pergerakan harga pasar.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tahun 2014, terdapat pelampaian limit karena pergerakan pasar yang eksrem, namun secara umum dapat dikatakan bahwa nilai VaR rata-rata baik secara per kuartal maupun keseluruhan satu tahun terakhir masih jauh dibawah limit VaR yang diperkenankan. Demikian juga halnya dengan nilai rata-rata BPV dan rasio NOP sepanjang tahun 2014 yang masih berada jauh dibawah limit yang ditentukan.

Pemantauan atas eksposur risiko pasar dilakukan secara tersentralisasi melalui kantor regional yang secara harian dan berkala mengirimkan laporan-laporan hasil perhitungan VaR, BPV, NOP serta *Stop Loss Advisory* untuk meyakinkan tidak terjadinya pelanggaran limit. Atas semua informasi eksposur risiko pasar termasuk hasil *Stress Testing* dan *Back Testing* telah didiskusikan dalam rapat *Risk Committee* dan *ALCO* secara bulanan dengan melibatkan bagian terkait seperti kredit, *finance* dan departemen lainnya untuk memutuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas dilakukan secara menyeluruh yang mencakup seluruh elemen

the resilience of the Bank when facing some extreme scenarios of market price movements has been implemented.

Based on the monitoring results for the year 2014, there were limit exceedances due to extreme market volatilities in June to July, nevertheless in general it can be said that the average value of VaR both a quarterly and a whole last year is still far below the allowed VaR limit. Similarly, the average value of BPV and NOP ratio in 2014 is still far below the specified limit.

Monitoring of market risk exposure is done centrally in the regional office on a daily basis and periodically submit reports on the calculation of VaR, BPV, NOP and Stop Loss Advisory to ensure no limit violations. Over all market risk exposure information including the results of Stress Testing and Back Testing has been discussed in the Risk Committee and ALCO monthly meetings involving the relevant sections such as credit, finance and other departments to decide on the follow-up that needs to be done.

Liquidity Risk

Liquidity risk management is performed comprehensively that includes all elements of

bank atau perusahaan dimana hasil analisa dan laporan akan memberikan evaluasi yang ekstensif terhadap kondisi likuiditas bank. Hal ini juga dilakukan secara global dimana bank menggunakan *centralized funding model* dan mengukur risiko likuiditas secara terkonsolidasi di tingkat pusat. Model ini memungkinkan bank untuk mengoptimalkan persediaan likuiditas secara global, memberikan pandangan mengenai risiko likuiditas secara konsisten serta meminimasi biaya ekonomis dari pengelolaan posisi likuiditas secara global. Bank akan menerima dukungan pendanaan dan modal dari kantor pusat, serta dapat meminjam atau memberikan pinjaman kepada seluruh cabang atau pihak terkait di dalam grup perusahaan sesuai dengan *centralized funding model* yang diterapkan secara konsisten di seluruh bank.

Disamping itu kerangka kerja pelaporan manajemen likuiditas telah menentukan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab secara jelas. *Funding limit and guideline* telah ditentukan yang terkait dengan *liquidity stress test* bulanan sehingga dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan likuiditas bank dalam menghadapi kondisi pada saat yang ketat atau kurang menguntungkan.

Risiko Operasional

Untuk mengantisipasi risiko yang bersifat operasional, bank telah melakukan langkah-langkah koordinasi guna memastikan bahwa dampak kegagalan operasi yang berasal dari

the bank or the firm where the results of the analysis and report will provide an extensive evaluation of the bank liquidity condition. This is also done globally where the bank uses a centralized funding model and measure liquidity risk consolidated at the central level. This model allows the bank to optimize the global liquidity inventory, provide a view of the liquidity risk consistently and minimize the economic costs of managing the liquidity position globally. The bank will receive capital funding and support from its headquarters, and can borrow or lend to all branches or related parties within the group of companies in accordance with the centralized funding model that is applied consistently throughout the bank.

Besides, the liquidity management reporting framework has defined the scope of duties and responsibilities clearly. Funding limit and guidelines has been set that is associated with the monthly liquidity stress test in order to obtain confidence in the bank's liquidity ability to overcome stringent or less profitable conditions.

Operational Risk

To anticipate operational risks, the bank has made coordination measures to ensure that the impact of failure stemming from internal processes, systems and human errors can be

proses internal, sistem dan kesalahan manusia dapat dimitigasi. Guna memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, isu-isu yang berkaitan dengan risiko operasional dibahas dalam rapat *Local Operating Committee (LOC)* yang dihadiri oleh semua level kepala divisi operasional dibawah *Chief Administrative Officer*. Disamping itu, secara rutin setiap divisi melakukan aktivitas penilaian *Control Self Assessment (CSA)* yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengontrol isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari dalam rangka memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi efektifitas operasional bank. Berdasarkan hasil CSA tersebut, setiap bulan sekali bank melakukan konsolidasi dalam bentuk *Local Operating Risks Scorecards* untuk mengetahui adanya gejala-gejala awal penyimpangan atau *early warning indicators* berdasarkan batasan ukuran dari indikator-indikator risiko operasional yang telah didefinisikan sebelumnya.

Risiko Reputasi dan Hukum

Selain risiko kredit, pasar, operasional dan likuiditas, bank juga sangat mementingkan pengelolaan atas risiko reputasi dan hukum yang dapat berasal dari hubungan dengan nasabah, investor, regulator dan masyarakat. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap karyawan di bank kami untuk memastikan

mitigated. To ensure all operations run in accordance with the bank's systems and procedures have been established, the issues related to operational risks discussed in the Local Operating Committee (LOC) , which was attended by all levels of operational division chief under Chief Administrative Officer. In addition, each division routine activity assessment Control Self Assessment (CSA) that serves to identify, measure, monitor and control issues related to the daily operational activities in order to ensure that it does not affect the effectiveness of the bank's operations. Based on the results of the CSA, consolidation is done once every month in the form of Local Operating Risks Scorecards to detect early signs of irregularities or early warning indicators based on the size limitation of operational risk indicators that have been defined previously.

Reputation and Legal Risks

In addition to credit, market, operational and liquidity risks, the Banks is also very concerned with the management of reputation and legal risks that can come from relationships with clients, investors, regulators and the public. It is the duty of every employee in the Bank to ensure every aspect of the law

setiap aspek yang berkaitan dengan reputasi dan hukum menjadi prioritas utama diantaranya adalah ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta menjunjung tinggi kode etik perusahaan yang telah dituangkan dalam dokumen *Code of Conduct*.

c. Risiko Komposit & Profil Risiko

Secara menyeluruh profil risiko komposit JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta untuk Triwulan IV – 2014 dapat dikategorikan sebagai “RENDAH” atau *Low Risk*. Pada dasarnya penilaian ini dikarenakan sistem manajemen dan pengendalian risiko yang dimiliki Bank berfungsi dengan baik. Disamping itu Bank telah memenuhi peraturan-peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bidang manajemen risiko serta telah melaporkan Profil Risiko bank secara triwulanan kepada Bank Indonesia berdasarkan parameter-parameter pengukuran yang telah disepakati. Aktivitas pemantauan dan monitoring telah dilakukan serta didiskusikan secara rutin dalam rapat *Risk Committee* dan komite-komite lainnya serta diskusi langsung dengan Bank Indonesia atau dengan Otoritas Jasa Keuangan.

relating to reputation and be a top priority of which is adherence to the applicable rules and laws and uphold the company's code of ethics set forth in the Code of Conduct document.

c. Composite Risk & Risk Profile

Overall risk profile of the composite JPMorgan Chase Bank, NA Jakarta for Quarter IV – 2014 can be categorized as "LOW" or Low Risk. This assessment is based on the well functioning of the Bank risk management and control system. In addition, the Bank is in compliance with Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan regulations in the field of risk management and risk profile of banks has been reported to Bank Indonesia on a quarterly basis based on the measurement parameters that have been agreed upon. Activity to supervise and monitor has been carried out and regularly discussed in the Risk Committee meetings and other committees as well as direct discussions with Bank Indonesia or Otoritas Jasa Keuangan.

V. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR **V. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTY AND LARGE PROVISION OF FUNDS**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dilakukan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Provision of funds to related parties by the Bank by applying the prudential principles through the provision of funds' portfolio spread or diversification as guided by Bank Indonesia Regulation on Lending Limit Limit for Commercial Bank.

Posisi penyediaan dana per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Provision of funds position by December 31, 2014 are as follows:

No	Penyediaan Dana / Provision of Funds	Jumlah / Amount	
		Debitur <i>Debtor</i>	Nominal (Jutaan Rupiah) <i>Nominal (million Rupiah)</i>
1.	Kepada Pihak Terkait / To Related Party	-	-
2.	Kepada Debitur Inti / To Core Debtor: a. Individual b. Group	25 -	8.634.289 -

VI. RENCANA STRATEGIS BANK

VI. BANK STRATEGIC PLAN

Target Jangka Panjang

Di Indonesia Bank akan tetap fokus kepada pemenuhan kebutuhan keuangan nasabah multinasional, korporasi Indonesia, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank. Pemenuhan target Bank dilakukan melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang sudah ada maupun yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Long Term Target

The Bank will continue to focus on meeting the financial needs of multinational customers, corporations, banks and non-bank financial institutions in Indonesia. Achievement of the Bank's target is done through the provision of existing banking products and services and new ones that are tailored to the needs of the Bank's customers.

Target Jangka Pendek

Sesuai dengan tujuan Bank, maka target (fokus) kegiatan Bank selama 1 (satu) tahun ke depan masih tetap pada pemenuhan kebutuhan finansial nasabah korporasi, baik dari sisi pendanaan maupun sisi penyaluran dana. Kami akan tetap memelihara tingkat NPL < 5%, dan meneruskan fungsi intermediasi bank.

Short Term Target

In accordance with the Bank's objectives, the target (focus) activities of the Bank for 1 (one) year ahead still remains on meeting the financial needs of corporate clients, both in terms of funding and the provision of funds. We will continue to maintain the level of NPLs <5%, and continue the Bank's intermediation function.

Target Jangka Menengah

Kegiatan usaha bank selama 3 (tiga) tahun ke depan masih akan tetap pada pemenuhan kebutuhan finansial pada segmen nasabah korporasi.

Medium Term Target

The business activities of the bank for 3 (three) years ahead will remain on meeting the financial needs of the corporate customer segment.

VII. ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Aspek transparansi oleh Bank dilakukan dengan mempublikasikan kondisi keuangan secara berkala dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank serta penyampaian transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Seluruh pelaksana fungsi Dewan Komisaris dan anggota Pimpinan Kantor Cabang tidak memiliki saham yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih baik pada Bank, pada bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lainnya, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan tidak tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga satu sama lain, termasuk dengan pemegang saham pengendali Bank.

VII. FINANCIAL AND NON-FINANCIAL TRANSPARENCY ASPECT OF THE BANK

The transparency aspect is carried out by the Bank by regularly publishing financial conditions based on the Bank Indonesia Regulation on Transparency of Financial Condition and transparency of information regarding product delivery and use of customer data based on the Bank Indonesia Regulation on Transparency Product Information and Use of Customer Personal Data. The implementation of the Board of Commissioners function and members of the Board Leadership do not own shares of 5% (five percent) or above on the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies, domiciled in and outside the country and not to have financial and family ties with each other, including the controlling shareholder of the Bank.

VIII. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN PIMPINAN KANTOR CABANG

VIII. REMUNERATION PACKAGE/POLICY AND OTHER FACILITIES FOR THE BRANCH LEADERSHIP

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Pimpinan Kantor Cabang untuk posisi tahun 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: *The remuneration package/policy and other facilities for the Branch Leadership as of 31 December 2014 are as follows:*

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain / <i>Remuneration Types and Other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun / <i>Amount Received in 1 Year</i>			
	Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioner</i>		Pimpinan Kantor Cabang / <i>Branch Leadership</i>	
	Orang / Person	Jutaan Rupiah / <i>Million Rupiah</i>	Orang / Person	Jutaan Rupiah / <i>Million Rupiah</i>
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / <i>Remuneration (basic salary, bonus, regular allowance, tantiem and other non-natura facilities)</i>	N/A	N/A		43.744
2. Fasilitas Lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang/ <i>Other facilities in natura form (housing, transportation, health insurance and others):</i>	N/A	N/A	6	2.157
Total			6	45.901

Jumlah anggota Pimpinan Kantor Cabang yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut: *The number of members of the Branch Leadership receiving remuneration packages are grouped in a single year in the range of income levels, as follows:*

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*) / <i>Total remuneration per person in 1 year *)</i>	Jumlah Pimpinan Kantor Cabang / <i>Number of Branch Leadership</i>	Jumlah Komisaris / <i>Number of Commissioners</i>
Di atas Rp 2 miliar / <i>Above Rp. 2 billion</i>	5	N/A
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp. 2 miliar / <i>Above Rp. 1 billion up to Rp.2 billion</i>	-	N/A
Di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar / <i>Above Rp. 500 million up to Rp.1 billion</i>	-	N/A
Rp 500 juta ke bawah / <i>Under Rp. 500 million</i>	-	N/A

*) yang diterima secara tunai/received in cash

**SHARE OPTION PIMPINAN KANTOR CABANG DAN PEJABAT EKSEKUTIF/
BRANCH LEADERSHIP AND EXECUTIVE OFFICERS' SHARE OPTIONS**

Keterangan/Nama <i>Information/Name</i>	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham) <i>Number of shares owened (shares)</i>	Jumlah Opsi / Number of Option		Harga Opsi (Dollar) <i>Option Price (Dollar)</i>	Jangka Waktu <i>Tenor</i>
		Yang diberikan (lembar saham) <i>Provided (shares)</i>	Yang telah dieksekusi (lembar saham) <i>Executed (shares)</i>		
Pimpinan Kantor Cabang & Pejabat Eksekutif <i>Branch Leadership & Executive Officers</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH
HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO**

a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest salary ratio of staf</i>	35.95 : 1
b) Rasio gaji pimpinan kantor cabang yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest salary ratio of branch leadership</i>	3.08 : 1
c) Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah <i>Highest and lowest salary ratio of Commissioner</i>	*)
d) Rasio gaji pimpinan kantor cabang tertinggi dan pegawai tertinggi <i>Ratio of highest salary between branch leadership and staf</i>	1.5 : 1

*) Anggota *Oversight Committee* yang melaksanakan fungsi Komisaris berkedudukan di luar negeri/ *Members of the Oversight Committee performing commissioner functions reside outside of the country*

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

IX. INTERNAL FRAUD

Tidak terdapat kasus penyimpangan internal *There is no internal fraud case in 2014.* selama tahun 2014.

Internal Fraud dalam 1 tahun <i>Internal Fraud in 1 year</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh / Number of cases performed by					
	Pengurus <i>Management</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary employee</i>	
	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>	Tahun sebelumnya <i>Previous year</i>	Tahun berjalan <i>Current year</i>
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan <i>Completed</i>	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank <i>In internal Bank settlement process</i>	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Settlement has not been sought</i>	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up through the legal process</i>	-	-	-	-	-	-

X. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum untuk posisi tahun 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

X. *LEGAL MATTERS*

Legal matters as of 31 December 2014 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Matters</i>	Jumlah / Number	
	Perdata <i>Civil claim</i>	Pidana <i>Criminal act</i>
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap / <i>Completed (has final and binding decision)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In settlement process</i>	1	-

XI. BUY BACK SHARES

XI. BUY BACK SHARES

Bank tidak memiliki program *Buy Back* *Bank has no Shares Buy Back program. Shares.*

XII. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2014 terdapat transaksi-transaksi valuta asing dan surat-surat berharga dengan pihak terkait Bank. Namun demikian, Bank akan terus memastikan transaksi-transaksi tersebut dilakukan secara wajar dan *arm's length* basis untuk menghindari timbulnya potensi benturan kepentingan.

XII. TRANSACTION WITH CONFLICT OF INTEREST

During the year 2014 there were foreign exchange transactions and securities to related parties of the Bank. Nevertheless, the Bank will continue to ensure these transactions are conducted properly and on an arm's length basis in order to avoid potential conflicts of interest.

No	Nama & Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan / Name & Rank Entity with Conflict of Interest	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan / Name & Rank Entity Taking the Decision	Jenis Transaksi / Transaction Type	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) / Transaction Value (million Rupiah)	Keterangan*) / Information
-	-	-	-	-	-

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku / *not in compliance with prevailing system and procedures*

XIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Dalam menjalankan misi sosialnya, JPMorgan Chase Bank, N.A memiliki berbagai kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui cabang-cabangnya yang ada di seluruh dunia dibawah koordinasi sebuah yayasan yang dinamakan *JPMorgan Chase Foundation*. Kegiatan ini berfokus pada tiga pilar utama yakni : pengembangan usaha kecil, kesiapan kerja dan kapabilitas keuangan. Didalam menjalankan kegiatannya, disamping bantuan finansial, pihak manajemen bank mendorong partisipasi karyawan dalam setiap kegiatan CSR kami.

Bekerjasama dengan pihak *Education Development Centre*, bank melakukan program pengembangan kesiapan kerja bagi para siswa SMK guna membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang layak dan peningkatan kewirausahaan. Proyek ini dilaksanakan secara serentak di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia dan Philipina melalui sebuah program yang dinamakan Proyek AWARE “*Accelerating Work Achievement Readiness Employment*”. Proyek ini memiliki pendanaan sebesar USD 400 ribu ini berjalan dalam dua terakhir dan telah mendapatkan tanggapan yang baik dari para stakeholder terkait termasuk murid, guru, pengusaha, Kementerian Pendidikan serta instansi terkait seperti Bappenas.

XIII. FUNDS CONTRIBUTION FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

In carrying out its social mission, JPMorgan Chase has a wide range of Corporate Social Responsibility (CSR) activities through its branches across world under the coordination of a foundation called the JPMorgan Chase Foundation. The activities focus on three main pillars: small business development, workforce readiness and financial capability. In carrying out its activities, in addition to financial assistance, the bank's management encourages employee participation in any of our CSR activities.

In cooperation with the Education Development Centre, the Bank established a program that support work readiness for the TVET students to help them get an appropriate job when they graduate from school. The project was carried out simultaneously in several countries in Asia, including Indonesia and Philippines, through the so-called program AWARE Project "Accelerating Work Achievement Readiness Employment". Overall project cost around \$ 400 thousands and has run for the last 2 years and have got positive responds from the respective stakeholders including the students, teachers, companies, the Ministry of Education as well as with Bappenas.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik selama tahun 2014.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Jakarta does not undertake funding for political activities during the year 2014.

KESIMPULAN UMUM

Mengacu pada uraian-uraian tentang pelaksanaan GCG pada Bank kami serta dari hasil penilian sendiri, dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan, tata kelola yang diterapkan oleh Bank kami telah memenuhi prinsip-prinsip dan semangat GCG sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance. Manajemen Bank telah melakukan GCG yang secara umum **Baik**. Sebagai kantor cabang bank asing Bank telah menyesuaikan struktur sesuai dengan yang ada di Kantor Regional dan Pusat Bank namun tetap memastikan fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan untuk memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) dan (3) dan Pasal 68 PBI No. 8/4/PBI/2006 dimana untuk fungsi Dewan Komisaris dan pembentukan komite disesuaikan dengan struktur organisasi yang berlaku pada Bank baik yang berada di Kantor Cabang Bank di Indonesia maupun yang berada di Kantor Pusat di Amerika Serikat.

GENERAL CONCLUSION

*With reference to the descriptions of the implementation of GCG in our Bank and based on self assessment results, it can be concluded that overall, governance applied by the Bank have met the principles and spirit of corporate governance as stipulated in Bank Indonesia Regulation concerning Good Corporate Governance. The Bank management has implemented GCG which is generally **Good**. As a branch of a foreign bank, the Bank has made adjustment in accordance with the existing structures in the Regional and Head Office, but still ensuring these functions can be implemented to meet the GCG principlesas governed by Article 67 paragraph (2) and (3) and Article 68 of Regulation No. 8/4/PBI/2006 where for the function of the Board of Commissioners and committee formation adapted to the prevailing organizational structure of the Bank either in bank branch offices in Indonesia and is located at the head office in the United States.*

Hormat Kami,

JPMorgan Chase Bank, N.A.
Jakarta Branch

IP. WIDYA.MARGHA PUTRA
Direktur Kepatuhan